

INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA TAHUN 2023-2024

Gibson Manuel Sigalingging¹, Yuniarti²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Abstrak

Konflik Israel-Palestina pada 7 Oktober 2023 merupakan sebuah babak baru dari konflik yang telah lama terjadi antar kedua negara tersebut. Memanasnya konflik disebabkan oleh serangan dadakan yang dilakukan Hamas dan direspon oleh pernyataan perang oleh Israel. Memanasnya konflik menyebabkan beberapa negara asing dan kelompok bersenjata yang turut terlibat dalam konflik sehingga mengakibatkan konflik berkembang dari yang awalnya bersifat intrastate menjadi konflik interstate. Adanya keterlibatan Amerika Serikat disebabkan oleh adanya kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah sehingga mendorong Amerika Serikat untuk melakukan intervensi baik secara militer, non-militer maupun diplomatik. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data library research yang akan dikumpulkan melalui sumber data sekunder. Penelitian ini akan menggunakan konsep intervensi dari K.J Holsti dengan berfokus pada bentuk-bentuk intervensi Amerika Serikat secara militer, non-militer dan diplomatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama konflik kembali memanas di 7 Oktober 2023 seperti memberikan bantuan pendanaan militer dan pengerahan militer ke wilayah konflik, memberikan kritikan serta sanksi kepada negara-negara yang tidak mendukung Israel hingga melakukan veto berulang dalam forum DK PBB yang membahas mengenai draft resolusi perdamaian untuk kedua negara.

Kata Kunci: Intervensi Militer, Intervensi Non-Militer, Intervensi Diplomatik, Amerika Serikat, Konflik Israel-Palestina.

Abstract

The Israeli-Palestinian conflict on the 7th of October 2023 was a new chapter in the long-standing dispute between the two nations. The conflict went to a higher level after a surprise attack by Hamas which was met by Israel declaring a war. The United States was one of the countries involved in the conflict. The basis of the involvement of the United States was their interests in the Middle East which consequently made them decide to intervene by all means military, non-military, and diplomatic. This study will adopt a descriptive qualitative research method implementing library research data analysis techniques. This research will draw on K.J. Holsti's theory of intervention and concentrate on the aspects of military, non-military, and diplomatic intervention by the United States. This study will employ the concept of intervention by K.J. Holsti, focusing on the forms of military, non-military, and diplomatic intervention of the United States.

Keywords: Military Intervention, Non-military Intervention, Diplomatic Intervention, United States, Israel-Palestinian Conflict.

1. PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik panjang yang terjadi dalam sejarah dunia. Konflik ini berawal dari berdirinya Israel tahun 1948 atas dukungan Inggris melalui Deklarasi Balfour yang dikeluarkan pada tahun 1917. Sejak awal berdirinya negara ini, terdapat perang-perang besar lainnya, yaitu perang kemerdekaan Israel (1948), Perang Enam Hari (1967), Perang Yom

Kippur (1973), Perang Lebanon Pertama (1982), Perang Lebanon Kedua (2006), Perang Gaza (2008), hingga terjadinya konflik Israel dan Hamas yang terjadi pada Oktober 2023 (CFR Education, 2024).

Konflik antara Israel dan Palestina yang terjadi pada Oktober 2023 diawali dengan serangan dadakan yang dilakukan oleh Hamas kepada Israel yang menewaskan 1.200 orang dan dianggap sebagai serangan paling mematikan dalam sejarah Israel. Serangan dadakan yang dilakukan oleh Hamas tersebut akhirnya direspon dengan pernyataan perang oleh Israel. Penyerangan 7 Oktober 2023 ini dianggap menjadi permulaan babak baru dari konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina (CNCB, 2023).

Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina pada babak ini telah mengakibatkan banyak korban tewas, terluka hingga hancurnya berbagai bangunan yang meliputi perumahan penduduk hingga infrastruktur pokok. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh *Palestinian Centra Bureau of Statistics* (PCBS) sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober 2023 jumlah korban yang tewas telah mencapai lebih dari 36.000 jiwa dengan 86.000 lainnya mengalami luka-luka.

Melihat banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan selama konflik terbaru ini menuai berbagai respon dari negara-negara lain mulai dari pro hingga kontra. Namun, terdapat sebagian negara seperti Mesir, Vatikan, Saudi Arabia, dan Tiongkok yang lebih mengecam penyerangan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua pihak. Terdapat sekurang-kurangnya empat puluh empat negara yang pro terhadap tindakan Israel. Negara-negara ini merespons dengan mengutuk Hamas dan mengecam taktiknya sebagai sebuah serangan terorisme dan mendukung operasi militer yang dilakukan oleh Israel sebagai hak untuk membela diri (washingtoninstitute.org, 2023).

Amerika Serikat termasuk salah satu dari 44 negara yang mendukung Israel. Bagi AS serangan Hamas terhadap Israel adalah sesuatu yang mengerikan sehingga negara ini pun mengutuk serangan yang dilakukan oleh Hamas. Intervensi AS dalam konflik ini bahkan menyebabkan konflik semakin meluas dan tidak kunjung selesai. Intervensi ini dilatarbelakangi karena adanya kepentingan negara yang dimiliki oleh Amerika Serikat kepada Israel.

Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana bentuk-bentuk intervensi militer, non-militer dan diplomatik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina tahun 2023-2024.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada (Adiputra, 2021). Dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder yang akan didapatkan melalui website-website internet dan berbagai sumber literasi seperti jurnal, buku, laporan tertulis hingga berita-berita terpercaya yang membahas mengenai konflik yang sedang berlangsung.

LANDASAN KONSEP

KONSEP INTERVENSI

Menurut J.G. Starke (1988) menjelaskan intervensi dengan istilah *subversive intervention* yang merupakan tindakan ke arah propaganda yang bertujuan mendorong terjadinya perang saudara di negara tersebut.

Untuk membedakan intervensi oleh suatu negara, K.J Holsti (1988) menjelaskan ada tujuh bentuk tindakan intervensi, yaitu:

a. Intervensi Militer

Intervensi militer merupakan pengerahan kekuatan militer berupa pasukan, persenjataan maupun alat militer lainnya.

b. Intervensi Non Militer

Intervensi non-militer merupakan intervensi yang dilakukan oleh suatu negara tanpa melibatkan kekuatan militer. Intervensi ini cenderung dilakukan dengan cara pemberian sanksi, penghentian kerjasama hingga pemberian bantuan kepada salah satu pihak yang sedang berkonflik.

c. Intervensi Diplomatik

Jenis intervensi ini dilakukan dengan melakukan kritikan terbuka melalui pejabat diplomatik suatu negara terhadap kegiatan politik negara lain.

d. Intervensi Klasik/Rahasia

Jensi intervensi yang dilakukan melalui tindakan terselubung yang dapat dilakukan melalui radio maupun selebaran.

e. Perang Gerilya

Jenis intervensi yang dilakukan dengan cara memenangkan kekuasaan yang sah dan mengasingkan kepemimpinan yang berkuasa.

f. Intervensi Subversi

Merupakan jenis intervensi yang dilakukan dengan menggunakan agen-agen dengan tujuan untuk mengubah keadaan politik dalam negeri suatu negara.

g. Demonstrasi Kekuatan

Jenis intervensi yang dilakukan dengan cara memamerkan kekuatan militer dengan tujuan untuk mengancam ataupun menghalangi pemberontakan dalam negeri.

Penelitian ini akan berfokus kepada bagaimana bentuk-bentuk intervensi militer, non-militer, dan diplomatik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina tahun 2023-2024.

3. INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA TAHUN 2023-2024.

Konflik Israel – Palestina

Deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1917 merupakan salah satu alasan dimulainya konflik antara Israel dan Palestina. Deklarasi Balfour merupakan sebuah pernyataan kebijakan sepihak yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris melalui Menteri Luar Negeri Inggris yang pada tahun itu diisi oleh Arthur James Balfour. Kebijakan yang dimuat dalam Deklarasi Balfour merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Inggris dengan tujuan untuk memenuhi janji politik Inggris agar mendapatkan dukungan dari bangsa Yahudi, khususnya bangsa Yahudi yang berada di Eropa dan Amerika Serikat (BBC News Indonesia, 2023).

Deklarasi Balfour memicu berbagai reaksi dari komunitas Yahudi dan Arab yang kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Bangsa Yahudi menganggap bahwa adanya Deklarasi Balfour dianggap sebagai dukungan resmi dari kekuatan negara besar untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina sehingga mengakibatkan gelombang imigrasi besar-besaran terhadap bangsa Yahudi ke Palestina. Sedangkan disisi lain komunitas Arab Palestina menganggap bahwa Deklarasi Balfour merupakan sebuah pengkhianatan terhadap kemerdekaan Arab dikarenakan sebelumnya Inggris juga telah berjanji

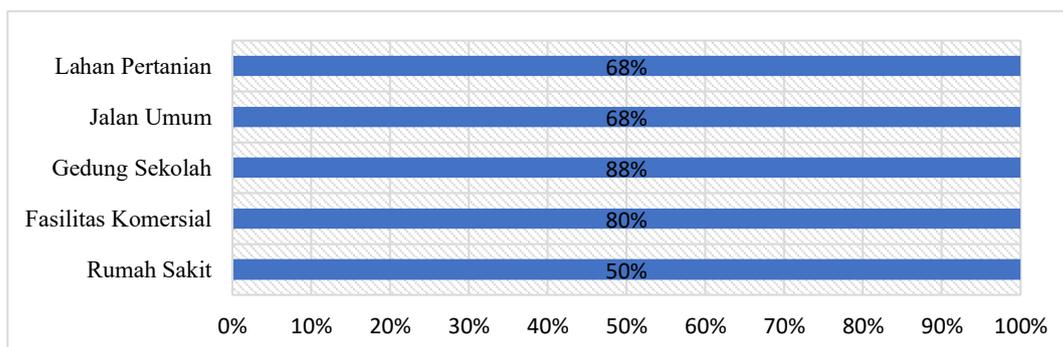
akan mendukung kemerdekaan negara-negara Arab (BBC News Indonesia, 2023).

Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan kejutan ke Israel dengan klaim sebagai serangan balasan atas rentetan tindakan kekerasan yang dilakukan Israel di Yerusalem. Merespons serangan yang dilakukan oleh Hamas tersebut, Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri dari Israel mendeklarasikan perang terhadap Hamas dan menanggapi serangan tersebut dengan melakukan serangan udara besar-besaran ke Palestina.

Konflik 7 Oktober 2023 yang terjadi antara Israel dan Palestina dianggap sebagai konflik yang paling mematikan dalam sejarah Israel (BBC Indonesia, 2024). Konflik yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 lalu tidak hanya mengakibatkan kerugian korban jiwa namun juga infrastruktur publik hingga perekonomian. Bagi sisi ekonomi, konflik tersebut mengakibatkan dampak terhadap kenaikan harga minyak dunia dikarenakan Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi produsen bagi minyak mentah dunia, sehingga adanya konflik menjadikan stabilitas perekonomian baik dikawasan maupun global menjadi terganggu.

Selain dampak perekonomian, konflik yang terjadi juga tentu memberikan dampak yang sangat parah terhadap infrastruktur dan penduduk. Sejak konflik

Grafik 1. Kerusakan Infrastruktur Palestina Periode 7 Oktober 2023 - 14 Januari 2024



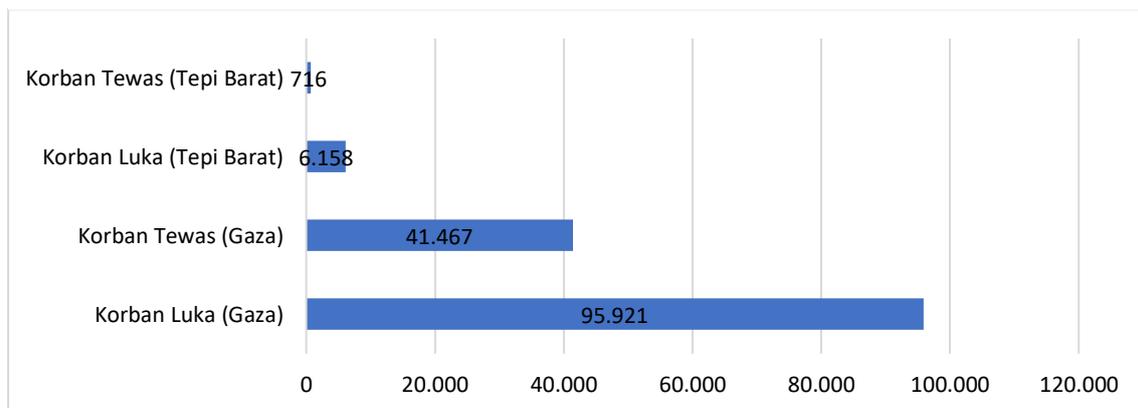
kembali memanas, Israel telah meluncurkan rentetan serangan yang mengakibatkan lebih dari 60% infrastruktur di Palestina hancur (Aljazeera, 2025). Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa bagian Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa terjadi kehancuran yang sangat parah selama 3 bulan konflik berlangsung.

Sumber: *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024*
<https://www.aljazeera.com/news/2025/1/16/israel-hamas-ceasefire-whats-left-of-gaza-and-its-people>

Selama 3 bulan pertama konflik terjadi terdapat kerusakan besar yang terjadi terhadap infrastruktur publik di Palestina. Infrastruktur yang paling besar mengalami kehancuran merupakan gedung-gedung sekolah beserta fasilitas komersial dengan total kehancuran mencapai 88% kemudian diikuti oleh infrastruktur seperti lahan pertanian, jalan-jalan umum, serta rumah sakit. Kerusakan-kerusakan ini disebabkan oleh operasi militer Israel yang memang menargetkan fasilitas-fasilitas umum di Palestina agar mendorong masyarakat sipil keluar dari zona konflik (Aljazeera, 2025).

Selain dalam bidang infrastruktur, konflik yang terjadi juga mengakibatkan banyak korban jiwa yang jatuh. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan dari BBC Indonesia, konflik yang terjadi pada 7 Oktober lalu mengakibatkan banyak korban jiwa yang jatuh baik dari sisi Israel maupun Palestina. Kementerian Kesehatan Hamas juga turut mengeluarkan data laporan yang berisi mengenai jumlah korban jatuh selama awal terjadinya konflik hingga 23 September 2024.

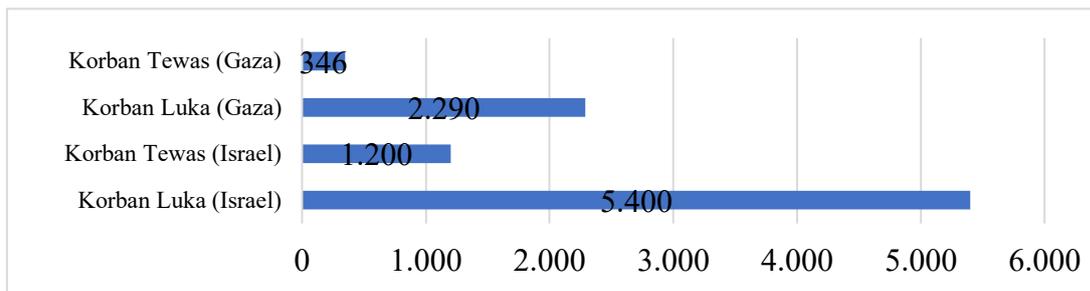
Grafik 2. Korban Jatuh Palestina Periode 7 Oktober 2023 - 23 September 2024



Sumber: Kementerian Kesehatan Hamas, 2024

<https://www.aljazeera.com/news/2025/1/16/israel-hamas-ceasefire-whats-left-of-gaza-and-its-people>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Hamas, wilayah Gaza merupakan wilayah yang paling banyak mengalami korban luka dengan jumlah diperkirakan mencapai 95.921 orang dengan korban tewas mencapai 41.467 korban jiwa.

Grafik 3. Korban Jatuh Israel Periode 7 Oktober 2023 - 23 September 2024

Sumber: *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*, 2024
<https://www.aljazeera.com/news/2025/1/16/israel-hamas-ceasefire-whats-left-of-gaza-and-its-people>

Selain korban dari sisi Palestina, Israel juga turut mengalami korban yang jatuh akibat konflik yang terjadi. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* menunjukkan bahwa korban yang jatuh dari pihak Israel paling banyak berada di wilayah Israel dengan korban luka 5.400 orang dan korban jiwa mencapai 1.200 orang. Di wilayah Gaza, Israel juga turut mengalami korban luka sebanyak 1.200 orang akibat operasi militer yang dilakukan di wilayah Gaza.

Konflik yang awalnya hanya melibatkan dua negara yaitu Israel dan Palestina saat ini juga telah berkembang menjadi konflik yang melibatkan berbagai aktor lainnya sehingga memperpanjang terjadinya konflik. Serangan balasan yang dilakukan oleh Israel dalam merespons serangan Hamas mengakibatkan banyak masyarakat sipil yang menjadi korban jiwa sehingga hal ini memicu kemarahan dari negara-negara dan kelompok bersenjata sekitar kawasan seperti Iran, Houthi (Yaman), dan Hizbullah (Lebanon).

Mulai dari negara hingga kelompok bersenjata di Kawasan Timur Tengah mulai melakukan operasi militer sebagai bentuk dukungan dan solidaritas terhadap Palestina. Beberapa operasi militer yang dilakukan seperti menyerang kapal-kapal induk militer Amerika Serikat yang melalui perairan Yaman oleh Houthi, melakukan penyerangan melalui udara seperti peluncuran rudal dan drone terhadap pertahanan Israel oleh Hizbullah. Disisi lain, Amerika Serikat beserta sekutu juga turut membantu Israel dalam menjalankan operasi militernya, Amerika Serikat beserta sekutu mengirimkan turut memberikan bantuan militer berupa persenjataan, pendanaan hingga pasukan untuk membantu Israel dalam menjalankan operasi militernya. Ikut campur tersebut

pada akhirnya membuat konflik ini tidak lagi menjadi konflik *intrastate* namun telah berkembang menjadi konflik *interstate*.

Di negara-negara Eropa Timur seperti Hungaria, Ukraina, dan Slovakia juga turut memberikan dukungan terhadap Israel dan menganggap bahwa agresi serta serangan yang dilakukan oleh Israel sebagai hak untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negaranya. Dukungan ini juga disebabkan karena adanya kedekatan politik kuat antara Israel dengan negara-negara pendukung Israel serta adanya hubungan ekonomi dan militer antara negara-negara yang mendukung Israel. Meski demikian negara-negara tersebut juga menyuarakan dukungan untuk mencari solusi terbaik terhadap kedua negara berkonflik.

Negara-negara Timur Tengah juga turut merespons atas memanasnya konflik tersebut. Iran, Suriah, dan Irak merespons konflik tersebut dengan memberikan dukungan serta pujian terhadap Hamas dan menganggap bahwa serangan yang dilakukan oleh Hamas merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap pendudukan Israel atas ekskalasi yang mereka lakukan. Pernyataan yang dikeluarkan oleh negara-negara tersebut dilatarbelakangi oleh alasan solidaritas dan kesamaan ideologis yang saling berkait antara Hamas dan Negara Timur Tengah.

Disisi lain negara-negara Arab teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, UEA, Mesir, dan Yordania merespons dengan menyerukan penghentian kekerasan serta mengutamakan de-ekskalasi dengan menekankan pentingnya melindungi warga sipil. Respons tersebut dikeluarkan diakibatkan adanya kekhawatiran akan konflik yang akan meluas menjadi perang besar di kawasan Timur Tengah, sehingga lebih berfokus kepada pencegahan konflik yang lebih luas untuk menjaga stabilitas regional dan mencegah konflik yang semakin besar.

Secara keseluruhan terdapat 44 negara yang mendukung operasi militer yang Israel lakukan atas penyerangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Negara-negara tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel 1. Daftar 44 Negara Yang Mendukung Israel.

Amerika Serikat	Perancis	Inggris	Italia	Jerman
Albania	Andorra	Austria	Belarus	Belgia
Bosnia	Bulgaria	Kanada	Kroasia	Siprus
Ceko	Denmark	Estonia	Finlandia	Georgia
Yunani	Hongaria	Islandia	Irlandia	Latvia
Lituania	Luksemburg	Malta	Moldova	Montenegro
Belanda	Makedonia Utara	Norwegia	Polandia	Portugal
Rumania	San Marino	Serbia	Slovakia	Slovenia
Spanyol	Swedia	Swiss		

Sumber: *The Washington Institute for Near East Policy, 2024*

<https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/international-reactions-hamas-attack-israel>

Tabel diatas berisi daftar negara-negara yang merespon konflik konflik yang terjadi dengan pernyataan dukungannya terhadap Israel. Dukungan yang diberikan oleh negara-negara tersebut di latar belakang atas bentuk solidaritas mereka kepada Israel selain itu negara-negara tersebut menganggap bahwa operasi militer yang dilakukan oleh Israel merupakan hak membela diri atas serangan brutal yang dilakukan oleh Hamas. Pernyataan dukungan negara-negara tersebut kepada Israel disampaikan melalui website resmi kenegaraan ataupun media sosial seperti "X" namun juga terdapat negara yang memberikan pernyataan dengan membuat konferensi pers secara langsung seperti Amerika Serikat.

Selain negara, Organisasi dan Tokoh Internasional juga turut memberikan respons mereka terhadap penyerangan tersebut. PBB dan Uni Eropa merespons dengan mengecam seluruh serangan yang dilakukan terhadap warga sipil dan mendorong perlindungan terhadap warga sipil serta memerintahkan penegakan hukum humaniter internasional. Salah satu tokoh internasional seperti Paus Fransiskus juga mengungkapkan kesedihan mendalam serta menyerukan solusi untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyerukan untuk melakukan pembentukan rancangan resolusi yang berisi seruan gencatan senjata antara kedua negara yang berkonflik. Setelah beragam penolakan dan kegagalan dalam membentuk rancangan resolusi, pada 10 Juni 2024 DK PBB akhirnya mengesahkan resolusi yang mendukung gencatan senjata di Gaza. Resolusi ini berisi seruan untuk menghentikan permusuhan dan melakukan pembebasan sandera, serta mendorong solusi politik untuk mengakhiri konflik.

Majelis Umum PBB merespons serangan yang terjadi tersebut dengan menyerukan gencatan senjata tanpa syarat dan mendorong perlindungan terhadap warga sipil yang berada di daerah berkonflik. Majelis Umum PBB juga merespons dengan mengadopsi dan menyetujui resolusi yang mengupayakan untuk melakukan gencatan senjata serta meminta akses aman untuk penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Respons yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB lebih berfokus pada keselamatan warga sipil yang berada di daerah konflik agar korban jiwa yang dihasilkan tidak semakin banyak. Namun, resolusi gencatan senjata yang diusulkan oleh Majelis Umum PBB tidak diterima oleh Amerika Serikat dan Israel karena dianggap lebih menguntungkan Hamas dan dapat membahayakan keamanan Israel (CNBC Indonesia, 2023).

Keterlibatan dan Kepentingan Amerika Serikat dalam Konflik Israel – Palestina

Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Israel-Palestina tentu berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Pada awal berdirinya Israel, Amerika Serikat memiliki 3 kepentingan nasional utama di Timur Tengah, yaitu minyak, Israel, dan stabilitas kawasan. Timur Tengah merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alamnya salah satunya adalah minyak. Sejak tahun 1920an ladang minyak di kawasan Timur Tengah selalu jadi perebutan bagi negara-negara saat itu seperti Perancis, Inggris, Uni Soviet termasuk Amerika Serikat. Pada masa itu juga hanya perusahaan-perusahaan minyak dari Perancis dan Inggris yang menjadi pemain utama dalam penguasaan minyak kawasan. Dominasi Amerika Serikat akan minyak Timur Tengah dimulai pada tahun 1930an dimana pada saat itu Amerika Serikat dapat menguasai minyak Timur Tengah dikarenakan Inggris dan Arab Saudi memiliki hutang terhadap Amerika Serikat.

Untuk menjaga kepentingan ekonomi serta dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah, Amerika Serikat memilih Israel sebagai mitra mereka di Timur Tengah dan mulai membantu persenjataan serta pasukan Israel, tentu ini dilakukan dengan dasar memperkuat posisi Amerika Serikat di Timur Tengah. Salah seorang reporter senior asal The New York Times, James Feron (1966) mengatakan bahwa Amerika Serikat pada akhirnya berkesimpulan bahwa Amerika Serikat harus bergantung kepada kekuatan lokal untuk menangkal

kekuatan lain sebagai lini pertama dalam keterlibatan langsung Amerika Serikat. Untuk itu Israel yang paling cocok dengan strategi Amerika Serikat itu.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina pada 7 Oktober 2023 kemarin juga tidak lepas dari adanya pengaruh politik dalam negeri Amerika Serikat. Dalam tubuh pemerintahan Amerika Serikat terdapat AIPAC yang memiliki peran penting dalam perpolitikan Amerika Serikat. *American Israel Public Affairs Committe* (AIPAC) adalah sebuah kelompok lobi politik yang ada di Amerika Serikat yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan dan memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Israel. AIPAC menjadi kelompok lobi yang memiliki peran untuk melobi kongres dan pemerintah mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat agar terus mendukung Israel.

AIPAC menjalankan perannya dengan melakukan advokasi mengenai kebijakan yang selaras dengan kepentingan Israel, melakukan legislasi, penggalangan dana, hingga mempengaruhi sidang-sidang komite. Pengaruh terbesar AIPAC terdapat pada kemampuannya dalam mendukung kandidat politik yang sejalan dengan perjuangannya melalui bantuan keuangan (McGreal, 2022). Salah satu bentuk keberhasilan AIPAC dalam mempengaruhi pengambilan keputusan Amerika Serikat dapat terlihat dalam pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tahun 2017, pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ini adalah salah satu bentuk keberhasilan AIPAC yang tercantum dalam *Jerusalem Embassy Act* tahun 1995. Dalam konflik 7 Oktober 2023 AIPAC turut berkontribusi dengan cara mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam rapat sehingga meningkatkan alokasi bantuan luar negeri dan kerja sama militer. AIPAC juga berkontribusi dengan turut mengendalikan atau bekerjasama dengan media-media pro-Israel yang ada di Amerika Serikat seperti Fox News dengan menyajikan berita dan narasi pro-Israel untuk membentuk opini publik di Amerika Serikat sehingga dukungan publik terhadap Israel tetap stabil.

Bentuk-Bentuk Intervensi Amerika Serikat

1) Intervensi Militer

Dalam menanggapi konflik yang kembali memanas di 7 Oktober 2023 kemarin, Amerika Serikat dengan cepat juga turut memberikan respons terhadap konflik tersebut dengan memberikan statement bahwa Amerika Serikat

menyatakan dukungan penuh kepada Israel serta mengutuk keras Hamas dan tindakan teroris mengerikan yang mereka lakukan (washingtoninstitute.org,2023). Dan dalam merespons serangan tersebut, Pemerintah Amerika Serikat juga telah menyetujui bantuan keamanan untuk operasi militer Israel di Gaza sebanyak setidaknya \$17,9 miliar yang akan berlangsung sejak 7 Oktober 2023 hingga September 2024.

Tabel 2. Bantuan Pendanaan Amerika Serikat Periode 7 Oktober 2023 - September 2024

Bentuk Bantuan	Jumlah Bantuan
Pembiayaan Militer Asing	\$6,800
Pertahanan Rudal	\$4,500
Pertahanan Rudal (Balok Besi)	\$1,200
Peningkatan Produksi Artileri	\$1,000
Persediaan persenjataan AS untuk Israel	\$4,400
Total	\$17,9 Miliar

Sumber: *Watson Institute for International & Public Affairs*, 2024
<https://watson.brown.edu/costsofwar/papers/2024/USspendingIsrael/>

Sejak awal terjadinya konflik 7 Oktober 2023 Amerika Serikat telah memberikan banyak bantuan berupa pendanaan kepada Israel yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasi militer Israel. Alokasi bantuan terbanyak yang diberikan oleh Amerika Serikat diberikan dalam bentuk persediaan dan perlengkapan militer dengan total bantuan mencapai \$11.100 miliar selain itu juga terdapat bantuan pendanaan yang berasal dari pembiayaan militer asing sebesar \$6.800 miliar. Selain bantuan berupa pendanaan Amerika Serikat juga memberikan bantuan dengan mengirimkan perlengkapan dan peralatan militer yang dibutuhkan oleh Israel selama melakukan operasi militer.

**Tabel 3. Bantuan Persenjataan Amerika Serikat
 Periode 7 Oktober 2023 - September 2024**

75 Kendaraan taktis ringan	14.100 Mk84	100 Drone Skydio X	3.000 Amunisi gabungan	200 Drone
2.600 Bom kecil	8.700 Mk82	1.800 M141	13.981 Anti tank	3.000 Rudal Hellfire
36.000 Amunisi 30mm	57.000 Amunisi 155mm	4.127.000 Kg Bahan bakar Jet	3.500 Night Vision	20.000 M4A1

Sumber: *Watson Institute for International & Public Affairs*, 2024
<https://watson.brown.edu/costsofwar/papers/2024/USspendingIsrael/>

Alokasi bantuan perlengkapan dan persenjataan yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel bertujuan untuk mendukung operasi militer yang dilakukan

oleh Israel selama konflik berlangsung. Bantuan persenjataan yang diberikan oleh Amerika Serikat beragam mulai dari bantuan berupa amunisi, peledak, hingga kendaraan lapis baja. Bantuan-bantuan tersebut diberikan oleh Amerika Serikat tersebut juga berguna untuk mengisi kembali persediaan yang terpakai selama menahan serangan yang dilakukan oleh Hamas ke ibukota Israel pada 7 Oktober 2023.

Selain bantuan berupa pendanaan militer dan bantuan peralatan militer, sejak 7 Oktober 2023, Amerika Serikat juga menunjukkan dominasinya secara langsung ke Timur Tengah. Amerika Serikat melakukan peningkatan aktivitas militernya dengan mengerahkan dua kapal perang induk dan pasukan amfibi di sepanjang Laut Merah dan Teluk Aden, Amerika Serikat juga meningkatkan jumlah pasukan skuadron mereka dengan tujuan untuk memperkuat pertahanan udara disekitar kawasan tersebut.

2) Intervensi Non Militer

Intervensi non-militer dilakukan oleh Amerika Serikat melalui pemberian sanksi ekonomi serta ancaman terhadap negara-negara pendukung Palestina. Salah satu bentuk intervensi non-militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat terjadi pada 27 Oktober 2023, beberapa minggu setelah serangan 7 Oktober 2023. Pemerintah Amerika Serikat, melalui Departemen Keuangan secara resmi mengumumkan terkait pemberian sanksi yang ditujukan terhadap beberapa orang yang dinilai memiliki keterkaitan dengan Hamas. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat “sanksi yang diberikan ini menargetkan operator keuangan, penyedia fasilitas, serta institusi keuangan yang mendukung operasional Hamas” (U.S. Department of the Treasury, 2023).

Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru yang menargetkan 21 warga Iran, warga negara asing, serta perusahaan-perusahaan yang dituduh terlibat dalam jaringan keuangan militer Iran salah satunya adalah perusahaan penukaran uang bernama Nabil Chouman & Co yang berpusat di Lebanon yang diyakini Amerika Serikat menjadi perusahaan yang digunakan oleh Hamas untuk melakukan transaksi keuangan dari Iran ke Gaza, pemilik perusahaan beserta dengan putra pemiliknya juga turut dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat. Tidak disebutkan secara rinci mengenai 21 orang dan

perusahaan yang dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat namun, beberapa diantaranya adalah;

Tabel 4. Daftar Nama dan Perusahaan yang diberikan Sanksi oleh Amerika Serikat

No	Nama	Jabatan / Perusahaan
1	Sayyed Mohammad Reza Seddighi Saber	Kepala Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan Iran
2	Ahmed Haghiat Talab	Pejabat Senior SPND dan ilmuwan nuklir Iran
3	Mohammed Reza Mehdipur	Pejabat yang berafiliasi dengan SPND
4	Fuya Pars Prospective Technologists	Perusahaan afiliasi SPND
5	Nabil Chouman	Pemilik Perusahaan Nabil Chouman & Co
6	Mohammed Chouman	Putra pemilik perusahaan Nabil Chouman & Co
7	Nabil Chouman & Co	Perusahaan penukaran uang di Lebanon

Sumber: *US Department of State*, 2024

<https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/05/imposition-of-new-u-s-sanctions-related-to-iranian-nuclear-related-research-with-potential-military-applications/>

Intervensi non-militer serta pemberian sanksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat bertujuan untuk memutus alur pendanaan yang menopang Hamas dalam melakukan serangan terhadap Israel. Amerika Serikat berharap dengan adanya intervensi non-militer serta sanksi yang diberikan dapat melemahkan kekuatan Hamas.

Amerika Serikat juga turut memberlakukan sanksi berupa embargo ekspor minyak terhadap Iran sebagai bentuk dari upaya menekan pendapatan Iran yang diduga menjadi bantuan untuk mendukung kelompok Hamas. Pada Oktober 2024, Departemen Keuangan Amerika Serikat melalui *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) memberlakukan sanksi terhadap lebih dari 30 pihak salah satunya broker minyak dan perusahaan pelayaran yang terlibat dalam penjualan minyak Iran. Langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini digunakan sebagai alat diplomatik untuk menekan Iran agar segera menghentikannya terhadap kelompok-kelompok yang dianggap teroris agar dapat mengurangi ancaman stabilitas kawasan.

Amerika Serikat juga melakukan penghentian bantuan dana kemanusiaan kepada *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA). UNRWA merupakan salah satu badan kemanusiaan asal PBB yang bertanggung jawab dalam menyediakan bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, dan pendidikan terhadap pengungsi Palestina. Amerika Serikat merupakan salah satu penyumbang dana terbesar bagi UNRWA dengan rata-rata bantuan tahunan hingga \$400 juta. Namun, pada Januari 2024, Amerika Serikat melalui kongres secara resmi mengumumkan keputusan terkait penghentian sementara seluruh bantuan dana kepada UNRWA hingga Maret 2025. Penghentian dana bantuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini merupakan salah satu bentuk keputusan yang diambil sebagai bentuk tanggapan atas tuduhan yang dikeluarkan oleh pemerintah Israel yang mengatakan bahwa sejumlah staff UNRWA diduga terlibat dalam serangan mematikan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

3) Intervensi Diplomatik

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang secara terang-terangan melakukan intervensi diplomatik dalam konflik tersebut, hal ini dapat terlihat melalui pernyataan dan tindakan resmi dari pemerintah Amerika Serikat yang secara terbuka menyatakan dukungan politik penuh dari Presiden Joe Biden kepada Israel atas konflik yang kembali memanas. Dalam beberapa forum atau pernyataan, Presiden Joe Biden menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri atas serangan yang dilakukan oleh Hamas. Amerika Serikat juga secara terang-terangan memberikan kritik terhadap negara-negara yang dinilai tidak tegas dalam mengutuk serangan yang dilakukan oleh Hamas dan malah mendukung serangan tersebut beberapa negara yang mendapatkan kritikan dari AS diantaranya Iran, Turki, Qatar, Suriah, serta beberapa negara-negara Afrika dan negara yang tergabung dalam OKI.

Amerika Serikat tidak hanya melakukan intervensi diplomatik terhadap negara-negara namun juga turut melakukan intervensinya terhadap lembaga hukum internasional, seperti International Criminal Court. Intervensi ini dilakukan oleh 12 senator Amerika Serikat dengan mengirimkan surat berisi ancaman kepada Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan. Surat tersebut berisi penegasan bahwa apabila ICC terus melanjutkan upayanya dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel maka Amerika Serikat akan

menghentikan segala bentuk dukungan pendanaan maupun diplomatik serta memberlakukan sanksi terhadap ICC. “Gugatan terhadap pemerintah Israel sama dengan mengancam kedaulatan AS dan apabila diteruskan maka kami akan menjatuhkan sanksi dan menghentikan segala dukungan AS terhadap ICC” (The Guardian, 2024).

Amerika Serikat juga mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi diplomatik terhadap negara-negara yang dianggap Amerika Serikat sebagai pendukung Hamas. Iran merupakan salah satu negara yang paling banyak mendapatkan kecaman sekaligus sanksi dari Amerika Serikat karena memberikan dukungan terhadap Hamas. Selain Iran, Qatar juga mendapatkan tekanan diplomatik dari Amerika Serikat berupa desakan untuk menutup kantor politik Hamas yang bermarkas di Doha serta menghentikan segala jenis bantuan terhadap kelompok tersebut. Tekanan diplomatik yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga terjadi di Turki, Amerika Serikat menunjukkan tekanan politiknya dengan menunda beberapa Pertemuan Tingkat Tinggi dengan pejabat Turki.

Dari sisi intervensi politik, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk menolak resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Sejak memanasnya konflik akibat penyerangan 7 Oktober 2023 Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya sebanyak 4 kali di Dewan Keamanan PBB.

Tabel 5. Veto Amerika Serikat dalam DK PBB

NO	NO SURAT	ISI DRAFT RESOLUSI	HASIL VOTE
----	----------	--------------------	------------

1	S/PV.9442 (18 Oktober 2023)	Rapat ini membahas mengenai situasi konflik di Timur Tengah. Rapat ini juga Membahas mengenai rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza yang diajukan oleh Brazil.	Mendukung: 12 Albania, Brazil, China, Ecuador, France, Gabon, Ghana, Japan, Malta, Mozambique, Switzerland. United Arab Emirates. Menolak: 1 United States of America. Abstain: 2 Russian Federation, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
2	S/PV.9499 (8 Desember 2023)	Rapat ini membahas mengenai situasi konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Draft ini juga berisi seruan untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Draft ini diajukan oleh Uni Emirat Arab	Mendukung: 13 Albania, Brazil, China, Ecuador. France, Gabon, Ghana, Japan, Malta, Mozambique, Russian Federation, Switzerland, United Arab Emirates. Menolak: 1 United States of America Abstain: 1 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
3	S/PV.9552 (20 February 2024)	Rapat ini membahas mengenai tuntutan gencatan senjata di Gaza serta penolakan terhadap pemindahan paksa warga Gaza.	Mendukung: 13 Algeria, China, Ecuador, France, Guyana, Japan, Malta, Mozambique, Republic of Koea, Russian Federation, Sierra Leone, Slovenia, Switzerland. Menolak: 1 United States of America Abstain: 1 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
4	S/PV.9790 (20 November 2024)		Mendukung: 14 Algeria, China, Ecuador, France, Guyana, Japan, Malta, Mozambique,

			Republic of Korea, Russian Federation, Sierra Leone, Slovenia, Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Menolak: 1 United States of America. Abstain: 0
--	--	--	---

Sumber: *United Nations*, 2023-2024.

Intervensi diplomatik yang dilakukan Amerika Serikat memberikan dampak yang menguntungkan bagi Israel karena mendapatkan dukungan dari negara adidaya. Namun, intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat mengakibatkan munculnya respons negatif akan keterlibatan Amerika Serikat yang mulai memandang bahwa kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah bukan sebagai mediator netral melainkan sebagai pihak yang memihak dan tidak objektif sehingga dinilai gagal dan malah menjadi penghalang bagi upaya perdamaian. Menurut Gerald M. Feierstein mantan Duta Besar Amerika Serikat mengatakan “harus juga diperjelas bahwa Washington telah gagal selama beberapa dekade ini untuk memenuhi tanggung jawabnya” (Middle East Institute, 2023).

Amerika Serikat juga turut mengajukan draft resolusi sendiri pada 22 Maret 2024. Draft resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat berisi mengenai penawaran pendekatan berbeda yang lebih memusatkan pada penyeimbangan antara dukungan terhadap Israel serta kebutuhan kemanusiaan di Gaza. Isi dari draft resolusi tersebut juga menekankan beberapa poin utama seperti mengutuk Hamas dan bentuk terorisme yang dilakukan oleh Hamas, memberikan perlindungan terhadap warga sipil di Gaza, dan menjaga status quo di beberapa situs suci salah satunya Yerusalem.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, kehadiran Amerika Serikat dalam konflik Israel dan Palestina pada 7 Oktober 2023 secara jelas menunjukkan adanya intervensi langsung dari negara tersebut baik dalam bentuk militer, non-militer maupun diplomatik.

Pertama, melakukan intervensi militer dengan cara menyetujui dan mengirimkan bantuan keamanan untuk operasi militer Israel di Gaza sebanyak

kurang lebih \$17,9 miliar yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 hingga September 2024. Amerika Serikat juga ikut terlibat secara langsung ke daerah konflik dengan mengirimkan dua kapal perang induknya serta meningkatkan jumlah pasukannya di sekitar Laut Merah untuk mempertegas dominasinya di Timur Tengah. *Kedua*, melakukan intervensi non-militer sebagai respon dan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi kepada negara-negara, pejabat, serta perusahaan yang dinilai Amerika Serikat memiliki keterkaitan dengan Hamas seperti Iran. Amerika Serikat juga melakukan penghentian bantuan kemanusiaan terhadap UNRWA karena terdapat beberapa anggota UNRWA yang terlibat dalam serangan yang dilakukan oleh Hamas. *Ketiga*, melakukan intervensi diplomatik dengan memberikan kritik terhadap negara-negara yang mendukung serangan Hamas. Amerika Serikat juga melakukan intervensi diplomatik dengan melakukan veto di DK PBB untuk menolak resolusi gencatan senjata di Gaza.

REFERENSI

- Barrucho, L. (2024). *Mengapa Timur Tengah penting bagi Amerika Serikat?*. BBC News Indonesia.
- Hanna Duggal, M. A. (2025). *Israel-Hamas ceasefire: What's left of Gaza and its people?* Qatar: Aljazeera.
- Holsti, K. (1987). *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Bandung : Binacipta.
- Luc. (2024, January 1). *Perang Israel-Hamas: Sejarah Kelam Konflik di Tanah Palestina*. From CNBC Indonesia : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231231191525-4-501657/perang-israel-hamas-sejarah-kelam-konflik-di-tanah-palestina>
- Middle East Institute (2023). *Expert Views: US Diplomacy and the Israel-Hamas War*. Washington: Middle East Institute.
- Nations, U. (2023, October 18). S/PV.9442 Security Council - Official Document System. From Welcome to the United Nations: <https://documents.un.org/doc/undoc/pro/n23/310/62/pdf/n2331062.pdf>
- Nations, U. (2023, December 8). S/PV.9499 Security Council. From Welcome to the United Nations: <https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2024/08/n2339552.pdf>
- Nations, U. (2024, February 20). S/PV.9552 Security Council. From Welcome to the United Nations: <https://docs.un.org/en/S/PV.9552>
- Nations, U. (2024, November 20). S/PV.9790 Security Council. From Welcome to the United Nations: <https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2024/11/n2435739.pdf>
- Office of The Press Secretary. (2016). *FACT SHEET: Memorandum of Understanding Reached with Israel*. Washington D.C.: The White House.

- Salem, M. (2025). *Israeli-Palestinian Conflict Timeline*. New York City : CFR Education.
- Starke, J.G (1988). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- The Guardian. (2024). *US Senators Threaten ICC Over Potential Arrest Warrants for Israeli Officials*. theguardian.com
- The Guardian. (2024). *UNRWA Funding Cuts Condemned amid rising Gaza Humanitarian Crisis*. theguardian.com
- U.S. Department of State. (2023). *Press Briefing by Secretary Antony Blinken*. state.gov
- U.S. Department of the Treasury. (2023). *Treasury Sanctions Hamas Operatives and Financial Facilitators Following Terrorist Attack on Israel*. home.treasury.gov
- U.S Embassy in Israel. (2024). *Kebijakan dan Sejarah*. U.S Embassy in Jerusalem